

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Oleh:

Drs. MURJANI

KEPALA BIDANG DATA DAN INFORMASI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi

Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD).

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban.





VISI

KALTENG MAKIN "BERKAH"

(Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

MISI

- Mempercepat Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif Dan Berwawasan Lingkungan
- Memperkuat Ketahanan Daerah Dan Mengantisipasi Perubahan Global
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
- Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing
- Meneguhkan Kalteng Yang Beriman, Berbudaya Dan Berkesetaraan Gender



H. Edy Pratowo, S. Sos., M. M.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH **TAHUN 2021 - 2026**

2024

2025

2026

2021

MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL 2022

STABILITAS EKONOMI DENGAN PENGUATAN SDM YANG BERDAYA SAING

AKSELERASI EKONOMI DAN SUMBERDAYA LOKAL DISERTAI PENINGKATAN SDM MENUJU KALTENG **SEJAHTERA DAN MANDIRI**

2023

PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN (GROWTH GREEN) MELALUI **PEBUKAAN INVESTASI DISERTAI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR MENUJU KALTENG ELOK DAN RAMAH**

MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN MELALUI PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU KALTENG UNGGUL DAN BERMARTABAT

MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN KALIMANTAN **TENGAH YANG** SEMAKIN BERKAH, **PENINGKATAN KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MENUJU** KEHARMONISAN **MASYARAKAT DAN** LINGKUNGAN

5 ARAHAN PRESIDEN UNTUK KEMEN PPPA Tahun 2020-2024





Kebijakan Satu Data Indonesia dan Integrasi dengan Satu Data Gender dan Anak

Gotong Royong Data Mencapai Indonesia Emas



Indonesia Emas 2045

Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan berkelanjutan



Mendukung Visi, Misi dan Goals Indonesia Emas 2045

Transformasi Digital Nasional







Mewujudkan

Tata Kelola
Pemerintahan yang
Baik (SPBE)

Data Pemerintah Berkualitas dan Terintegrasi (**SDI**)

Kebijakan SPBE dan SDI berjalan beriringan dan saling mendukung

Birokrasi Efisien dan Akuntabel

Layanan Pemerintah Berkualitas dan Mudah Diakses

Pembangunan Nasional Adaptif dan Tepat Sasaran







Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, SDGs, dan Penanggulangan Kemiskinan

Regulasi Perpres 39/2019 tentang SDI

"Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk MENGATUR PENYELENGGARAAN TATA KELOLA DATA yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan"





ACUAN
PELAKSANAAN
DAN
PEDOMAN
PENYELENGGARAA
N TATA KELOLA
DATA



KETERSEDIAAN DATA
YANG AKURAT,
MUTAKHIR, TERPADU,
DAN MUDAH
DIBAGIPAKAIKAN
ANTAR INSTANSI



MENDORONG
KETERBUKAAN DAN
TRANSPARANSI DATA



MENDUKUNG SISTEM STATISTIK NASIONAL

Arahan Presiden di Rapat Terbatas SDI

Dalam rangka melaksanakan Arahan Presiden pada Rapat Terbatas mengenai percepatan Kementerian/Lembaga/Daerah dalam implementasi kebijakan SDI.



Konsolidasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia



Satu Data Indonesia Mendukung Regristrasi Sosial Ekonomi



Enforcement Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia



Satu Standar Data

Satu Metdata Baku

Interoperabilitas

Kode Referensi/ Data Induk



Monitoring dan Evaluasi Satu Data Indonesia



Dukungan Infrastruktur TIK
Nasional: Pusat Data
Nasional (PDN) dan sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah (SPLP)



Urgensi Kebijakan Satu Data

Kondisi *Existing*Penyelenggaraan Data Pemerintah

- **Keberagaman** data dan metodologi pendataan yang belum berstandar
- Duplikasi dan minimnya keterpaduan data pemerintah
- Kekurangan SDM talenta digital dan efektivitas anggaran data di Instansi Pemerintah
- Ego sektoral dalam penyelenggaraan data dan platform data, serta keengganan berbagipakai data antar Instansi Pemerintah

Penyatuan Tata Kelola dalam Satu Data Indonesia

Tujuan Kebijakan Satu Data (Perpres 39/2019)

Mewujudkan ketersediaan data yang akurat,
mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan
dibagipakaikan antar Instansi Pemerintah
untuk mendukung perencanaan, pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan

Kebijakan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dalam Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak





Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak





sebagai acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam:

- penyelarasan Satu Data Gender dan Anak dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
- penyelenggaraan Satu Data Gender dan Anak di tingkat nasional dan tingkat daerah.



Tujuan

- mewujudkan tata kelola data gender dan anak
- meningkatkan ketersediaan data gender dan data anak
- mendorong keterbukaan, transparansi, dan kualitas data gender dan anak dalam rangka mendukung Kebijakan pemerintah yang responsive gender dan peduli anak

Ruang Lingkup Satu Data Gender dan Anak



1. Kualitas hidup perempuan



2. Perlindungan perempuan







4. Pemenuhan hak anak



5. Perlindungan khusus anak

Ruang Lingkup Data

1. Kualitas hidup perempuan memuat data mengenai upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, politik, hukum, dan lingkungan hidup

2. Perlindungan perempuan memuat data mengenai segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempua serta pemenuhan haknya melalui perhatian ya konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

3. Kualitas keluarga memuat data mengenai kondisi keluarga ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.



4. Pemenuhan hak anak memuat data anak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.





Ruang Lingkup Data

5. Perlindungan khusus anak

memuat data anak dalam:

- 1. situasi darurat,
- 2. anak yang berhadapan dengan hukum,
- 3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
- 4. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
- 5. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,
- 6. anak yang menjadi korban pornografi,
- 7. anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan,
- 3. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis,
- 9. anak korban kejahatan seksual,
- 10. anak korban jaringan terorisme,
- 11. anak penyandang disabilitas,
- 12. anak korban perlakuan salah dan penelantaran,
- 13. anak dengan perilaku sosial menyimpang,
- 14. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya, dan
- 15. anak dengan masalah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

INDIKATOR KINERJA URUSAN PPPA DAN PPKB YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021 S.D 2026

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



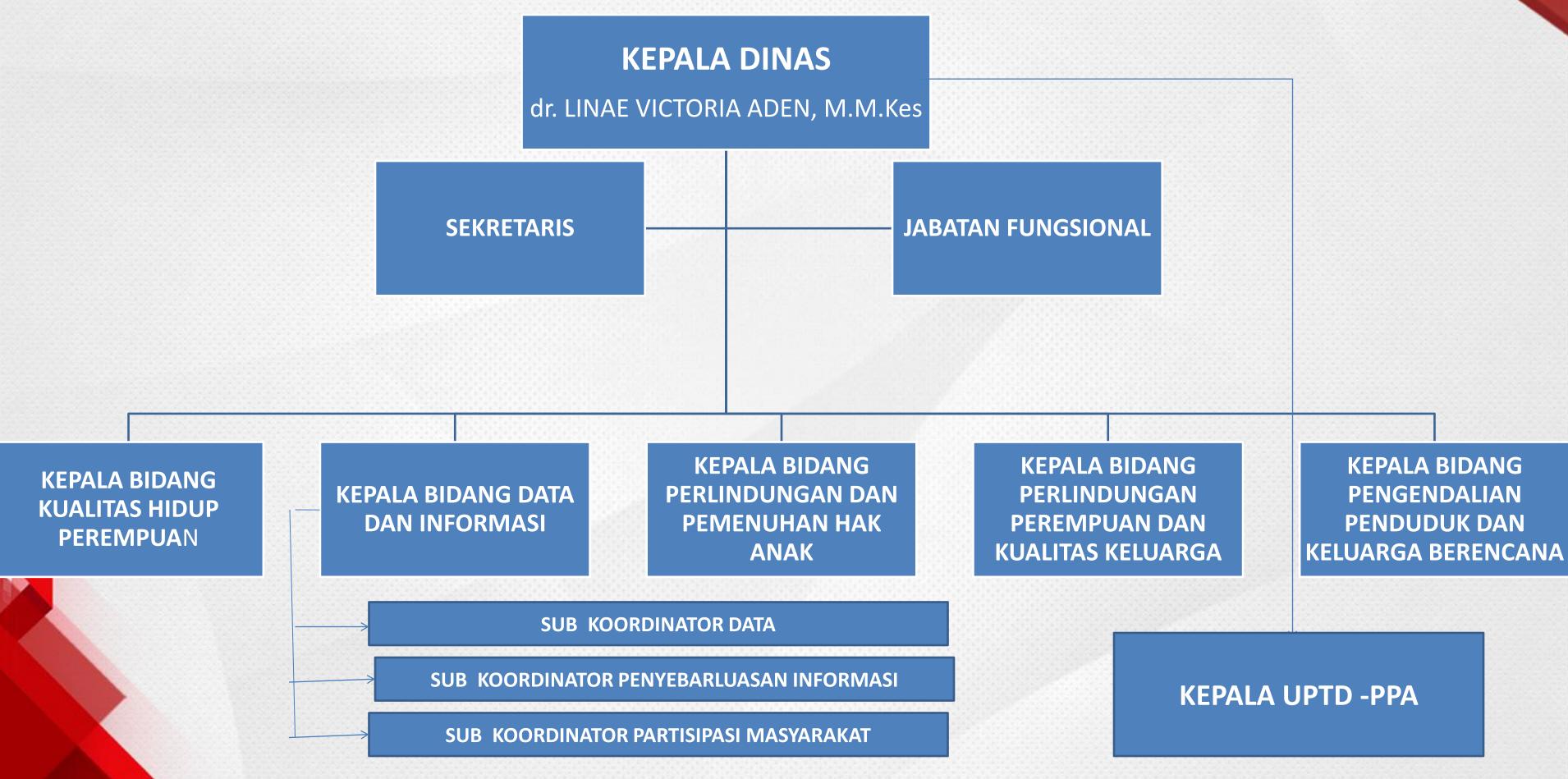
- 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- 2. Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD (%)
- 3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)
- 4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- 5. Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



- 1. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)
- 2. Angka kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)
- 3. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Moderm Contraceptive (mPCR)
- 4. Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) (%)
- 5. Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS P3APPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 37 TAHUN 2016

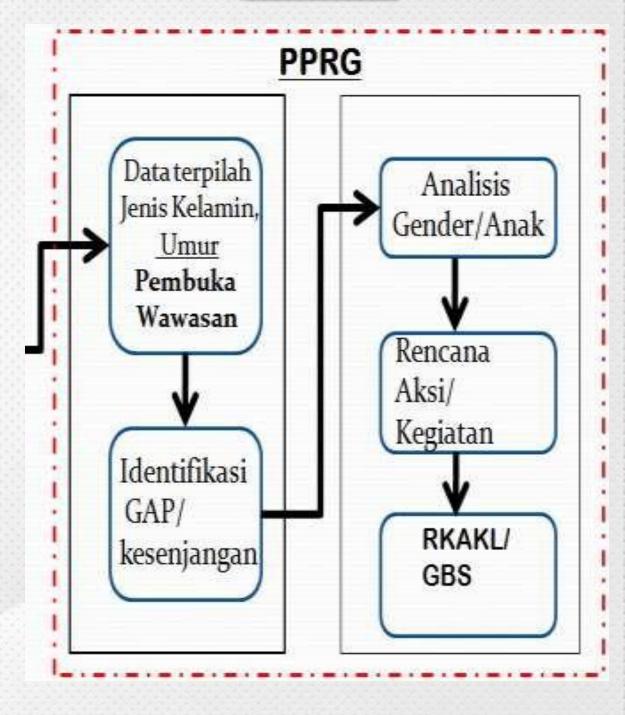


SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Permen, atau SK Menteri dan MoU, Regulasi di daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, SK Kepala Daerah, SK Pimpinan SKPD, dan MoU MANDAT: (APA, MENGAPA) Peraturan Untuk mempercepat terwujudnya persamaan Perundangan pandangan tentang penyelenggaraan data terpilah gender dan anak, serta memudahkan komunikasi Lembaga Yang diperlukan mekanisme sistem bertanggungjawab (SDM, Mekanisme penyelenggaraan data gender & Kapasitas (Siapa) ANGGARAN, dan anak **SARPRAS** Standar (bagaimana) 1. membentuk forum/kelompok kerja data terpilah. 2. Perekrutmen dan Peningkatan SDM pengelola data. 3. Peningkatan alokasi anggaran pengelola data. 4. IT yang memadai (Penyusunan SIGA).

Ketersediaan Data Gender Pemanfaatan Data Gender dan Anak

Data
sebagai
pembuka
wawasan
(statsitik
gender,
profil
perempuan
dan anak,
dll



DATA STATISTIK:

Menurut UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi

DATA dan STATISTIK GENDER:

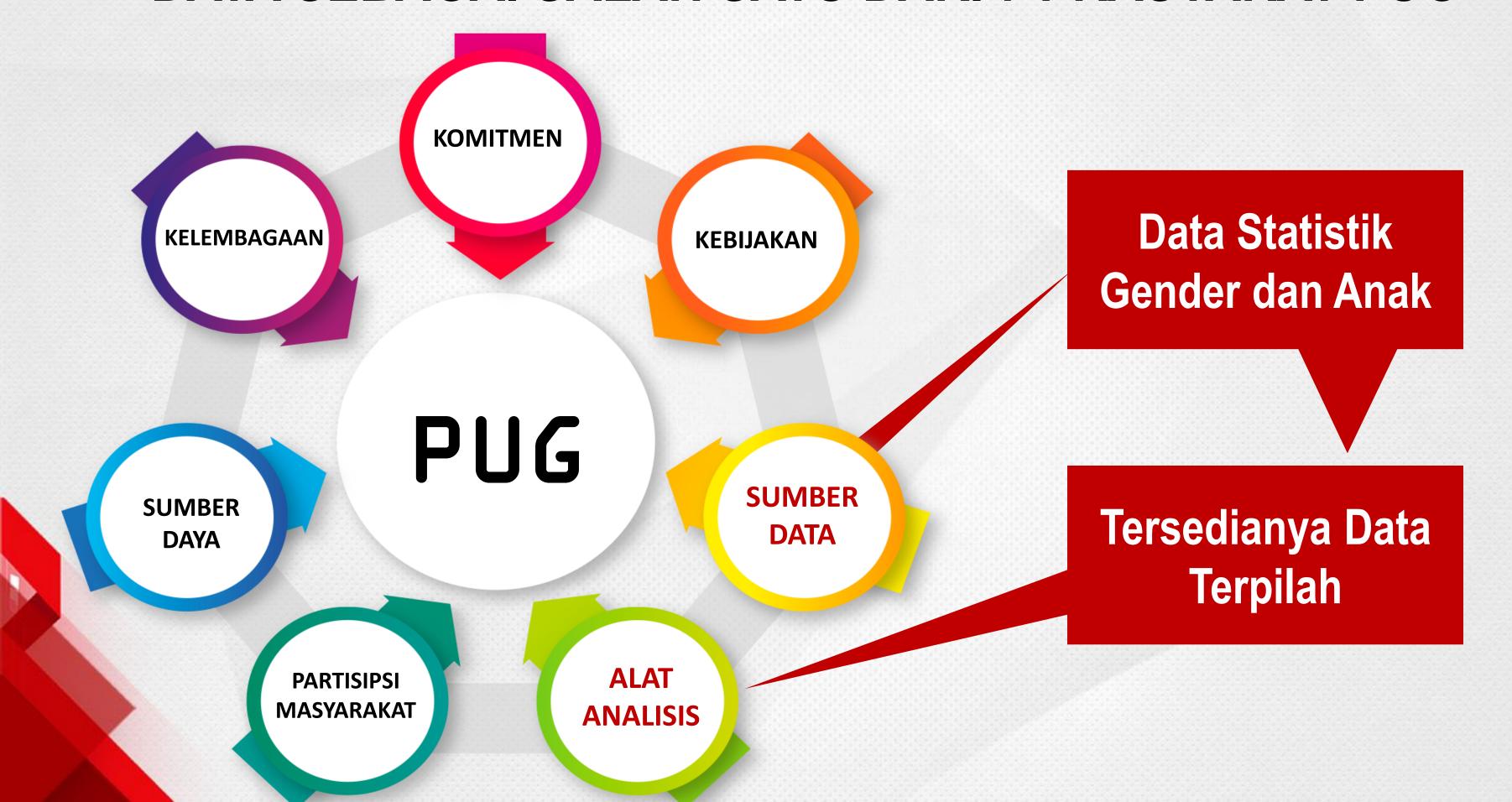
- Data gender adalah data mengenai hubungan/relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan.
- Statistik gender adalah kumpulan/sederetan/ringkasan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur yang menggambarkan status, peran dan kondisi laki-laki dan perempuan berdasarkan karakteristik data.







DATA SEBAGAI SALAH SATU DARI 7 PRASYARAT PUG



DATA TERPILAH

- Data terpilah berdasarkan jenis kelamin (sex-disaggregated data) adalah data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan dan dipersentasikan berdasarkan jenis kelamin laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.
- Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat (politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dll).

DEFINISI DATA

- Keterangan yang benar dan nyata
- Gambaran tentang suatu persoalan
- Sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan terhadap suatu objek
- Menurut UU No.16 tahun 1997 tentang Statistik, data adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi

DATA TERPILAH

Data yang dipilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur

Data Gender

- 1. Ekonomi
- 2. Politik, sosial dan hukum
- 3. Perlindungan Hak Perempuan
- 4. Pembangunan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga

Data Anak

- 1. Hak sipil dan kebebasan
- 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
- 4. Pendidikan
- 5. Perlindungan khusus

DASAR HUKUM

Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan **Pembangunan responsif gender** yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD

Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang

Permen PPPA No. 5 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan sistem data gender dan anak

Sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan daerah dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan /program /kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak

DASAR HUKUM

Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

Ruang Lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan di daerah.

Kelembagaan PUG terdiri dari Pokja PUG, Tim Teknis dan Focal Point

Kelembagaan PUG

Pokja PUG (Tingkat Pemda)

Tim Teknis / Driver PUG

(Bappedalitbang, Dinas P3APPKB, Inspektorat, Badan Keuangan)

Focal Point PUG

(Tingkat OPD)

PEMBAGIAN SUB URUSAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Pusat

Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional

Lamp

UU

23/

2014

Provinsi

 Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi

Kabupaten/Kota

 Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kabupaten/Kota

Produsen Data pada tingkat kelembagaan



NSPK

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria



- 1)penyediaan data gender dan anak ditingkat daerah provinsi;
- 2)penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah provinsi



- 1)penyediaan data gender dan anak ditingkat daerah Kab/Kota;
- 2)penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah Kab/Kota.

DATA GENDER DAN ANAK YANG PERLU DIKELOLA





Data Indikator Kinerja sesuai kebutuhan dalam memenuhi amanat kewenangan konkuren baik dalam Lampiran UU 23 tahun 2014 maupun dalam (R) PP-PUPK serta Tugas Fungsi KemenPPPA.



Data Kesetaraan-Keadilan Gender, sinthesa dari identifikasi kebutuhan data yang diamanatkan oleh CEDAW, Beijing Platform for Action 1995, dan SDG's serta indikator penilaian APE.



Data Perlindungan Anak, sinthesa dari identifikasi kebutuhan data yang diamanatkan CRC maupun dan UU terkait, 5 kalster hak anak dan perlindungan khusus anak dalam KLA, dan SDG's.



Data Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah khusus urusan PP dan PA.



Data Indikator Makro terkait dengan gender dan anak, ukuran keberhasilan makro : IPM, IPG, IDG, IKKA, IKK dll.

BAGAIMANA PENGUMPULAN DATANYA

SUMBER DATA

- 1. SENSUS: Pencacahan lengkap, yaitu Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, Sensus Ekonomi.
- 2. SURVEI: Pencacahan/pendataan secara sample/contoh, misalnya: Susenas, Supas, SDKI, Sakernas.
- 3. REGISTRASI : Hasil pencatatan terhadap suatu kejadian, misalnya kelahiran, kematian dan lainnya.

Pengelolaan Data

Pengumpulan

- Sensus
- Survei
- Kompilasi
- Cara lain

Pengolahan

- Editing
- Coding
- Input/entri
- Validasi

Analisis

- Deskriptif
- Inferens

Penyajian

- Tabel
- Grafik
- Indikator
- Multi channel

Pentingnya Data untuk Perencanaan Pembangunan



Siklus penyusunan perencanaan pembangunan (T-2 hingga T+1), artinya dimulai dari menyusun kajian kebijakan, penulisan dokumen perencanaan sampai dengan pengendalian atas pelaksanaan, yang menjadi input penyusun rencana tahun berikutnya.

Data berkualitas

"Penyusunan Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan → UU 25/2004, BAB VII DATA DAN INFORMASI, Pasal 31

Kebutuhan Data

Data Makro (Data Sensus), Survey.

Data Sektoral

Daerah dalam Angka

Untuk Apa?

Penyusunan *Background study*RPJMN dan RKP

Evaluasi capaian indikator Pem-bangunan (RPJMN, RKP, SDGs, Lampid Presiden, serta sebagai Data Dasar penyusunan proyeksi KEM, dll)

Evaluasi capaian indikator

Pemba-ngunan wilayah

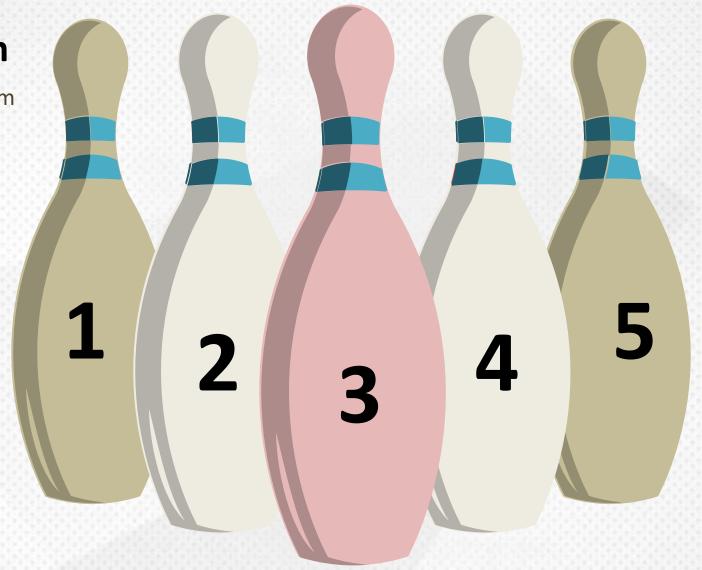
(RPJMN, RKP, SDGs, Lampid
Presiden, dll)

5 Arahan Presiden

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020-2024

Kewirausahaan Perempuan
Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam
Kewirausahaan

Pengasuhan anak
Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga Dalam
Pendidikan/Pengasuhan Anak



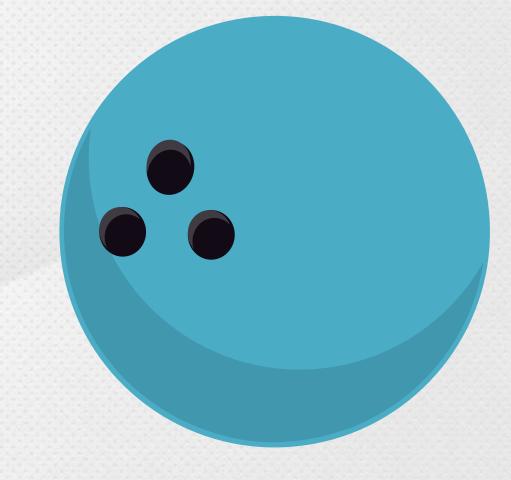
Kekerasan terhadap Perempuan & Anak

Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan
dan Anak

Pekerja Anak

Penurunan Pekerja Anak

Perkawinan Anak
Pencegahan Perkawinan Anak



Arahan Presiden Terkait Kekerasan Perempuan dan Anak

Rapat Terbatas, 9 Januari 2020



- 1. Prioritaskan pada aksi pencegahan kekerasasan pada anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
- 2. Perbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan pada anak.
- 3. Lakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak **dengan membentuk** *One Stop Services* (OSS), agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan lebih komprehensif.
- 4. Laksanakan proses penegakan hukum yang memberikan efek jera dan berikan layanan pendampingan bantuan hukum.
- 5. Berikan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial kembali.

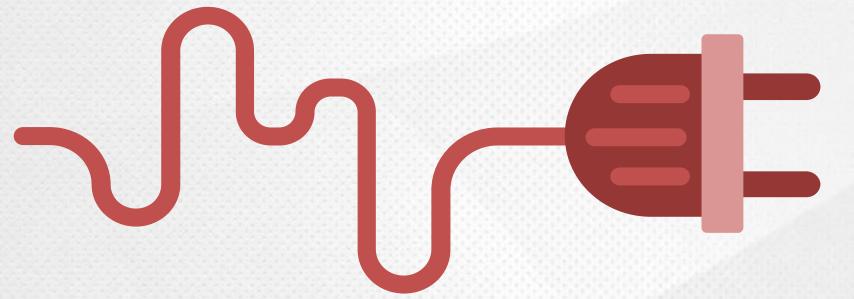


Presiden RI Joko Widodo

DUA APLIKASI YANG DIGUNAKAN KEMEN PPPA SECARA NASIONAL



Simfoni PPA



Data Kekerasan Nasional

Merupakan sistem yang sifatnya transaksional, sebagai sumber data mulai dari ruang sistem pengaduan s.d penanganan pengaduan berbasis manajemen kasus

SIGA



Satu Data Gender dan Anak

Rumah besar dalam memberikan data dan informasi terkait gender dan anak, salah satunya kategori data perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dilingkup data kekerasan, yang bersumber dari Simfoni PPA, sehingga bisa dianalisa keterhubungan dengan lainnya

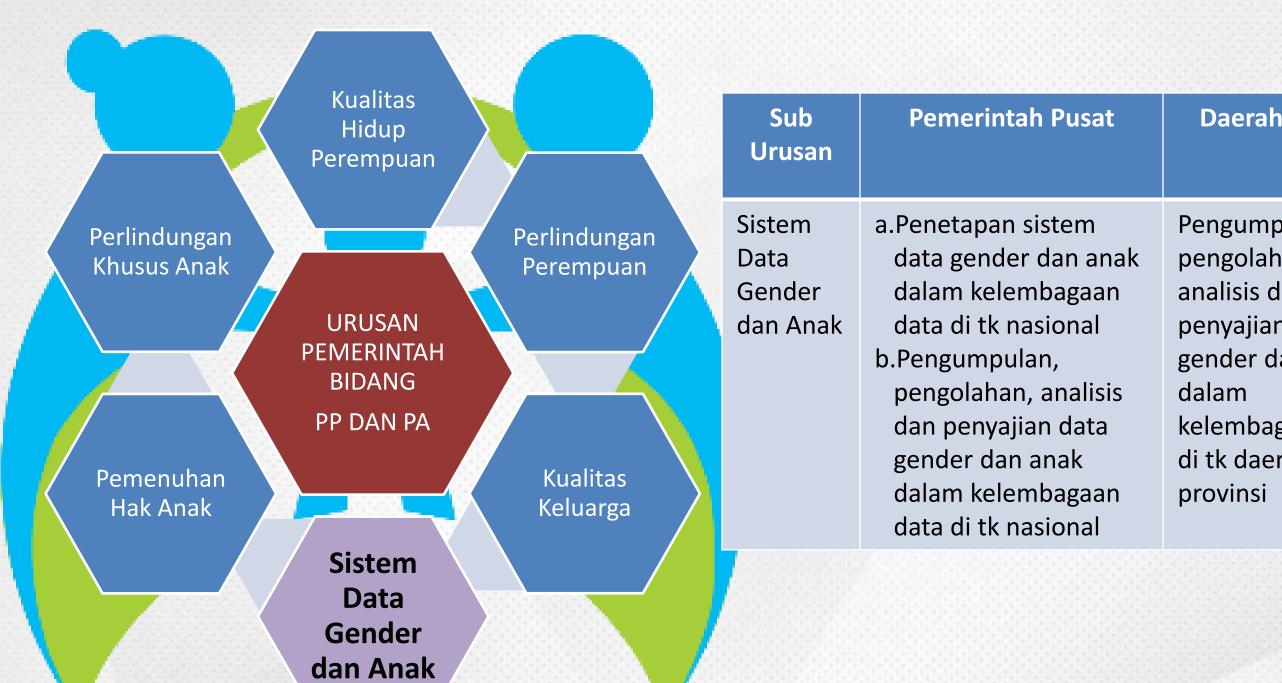
Ada 2 data Penting di SIGA:

- Data Gender → Data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
- Data Anak → Data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 tahun atau 0-17 tahun, yang terpilah menurut kategori umur.

MANFAAT DATA GENDER DANAK

- Mengidentifikasi perbedaan (kondisi/perkembangan) perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan, juga permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak (proses perencanaan);
- Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (pelaksanaan kegiatan)
- Mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan, laki-laki dan anak (pengambilan keputusan).

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
istem Pata Gender Ian Anak	a.Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tk nasional b.Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tk daerah provinsi	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tk daerah kab/kota

DATA GENDER DAN ANAK YANG HARUS DISEDIAKAN

Mencakup 5 sub urusan bidang PP dan PA:

- 1. Kualitas Hidup Perempuan: jumlah penduduk terpilah menurut jenis kelamin, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kewirausahaan, pemberdayaan perempuan, dll.
- 2. Perlindungan Perempuan: kekerasan terhadap perempuan, korban kekerasan yang mendapatkan layanan, pemberdayaan bagi korban kekerasan, dll.
- 3. Kualitas Keluarga: legalitas (akta nikah, akta kelahiran, keluarga tinggal bersama); ketahanan fisik (keluhan kesehatan, gizi keluarga, anak yang merokok, dll); ketahanan ekonomi (kepemilikan rumah, asuransi, tabungan, dll); ketahanan sosial psikologi (kekerasan dalam RT, kekerasan anak, melakukan kegiatan bersama, dll); ketahanan sosial budaya (perkawinan anak, lansia, melakukan kegiatan sosial dan keagamaan, dll).

DATA GENDER DAN ANAK YANG HARUS DISEDIAKAN

Mencakup 5 sub urusan bidang PP dan PA:

- 4. Pemenuhan Hak Anak: jumlah anak menurut kelompok umur, pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak (kepemilikan akta kelahiran, akses internet, Forum Anak); lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (anak terlantar, perkawinan anak, anak yang tidak tinggal Bersama kedua orang tuanya); kesehatan dasar dan kesejahteraan (imunisasi, ASI, keluhan kesehatan, dll); pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya (pendidikan yang ditamatkan, lama sekolah, mengikuti ekstrakurikuler, dll).
- 5. Perlindungan Khusus Anak: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV dan AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.



Terdapat 14 Kabupaten/Kota, yaitu:

- Kab. Kotawaringin Barat
- Kab. Kotawaringin Timur
- Kab. Kapuas
- Kab. Barito Selatan
- Kab. Barito Utara
- Kab. Sukamara
- . Kab Lamandai

- Kab. Seruyan
- · Kab. Katingan
- Kab. Pulang Pisau
- Kab. Gunung Mas
- Kab. Barito Timur.
- Kab. Murung Raya
- Kota Palangka Raya

KONDISI GEOGRAFIS PROVINSI KALTENG

Terletak pada garis equator di 0º 45 LU dan 3º30 LS. serta 111º -116º BT

Berbatasan dengan:

Utara: Provinsi Kalimatan 7 153 - 564 Km²

dan Kalimantan Barat

Selatan: Laut Jawa

Timur: Provinsi Kalimantan

Selatan dan

Kalimantan Timur

Barat : Provinsi Kalimatan

Barat.

Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah

Total Population of Kalimantan Tengah

2.741.075

Jiwa



Sumber: **BPS Kalteng** 2022

Kepadatan Penduduk

population density

Ji ω a per Kilometer Persegi

Person per square kilometre

KONDISI KEPENDUDUKAN PROVINSIAKALIENG

Tengah mendapat julukan sebagai

Bumi Tambun Bungai BALSAFAHPancashuma BETANG

Rasio Jenis Kelamin

Sex Ratio

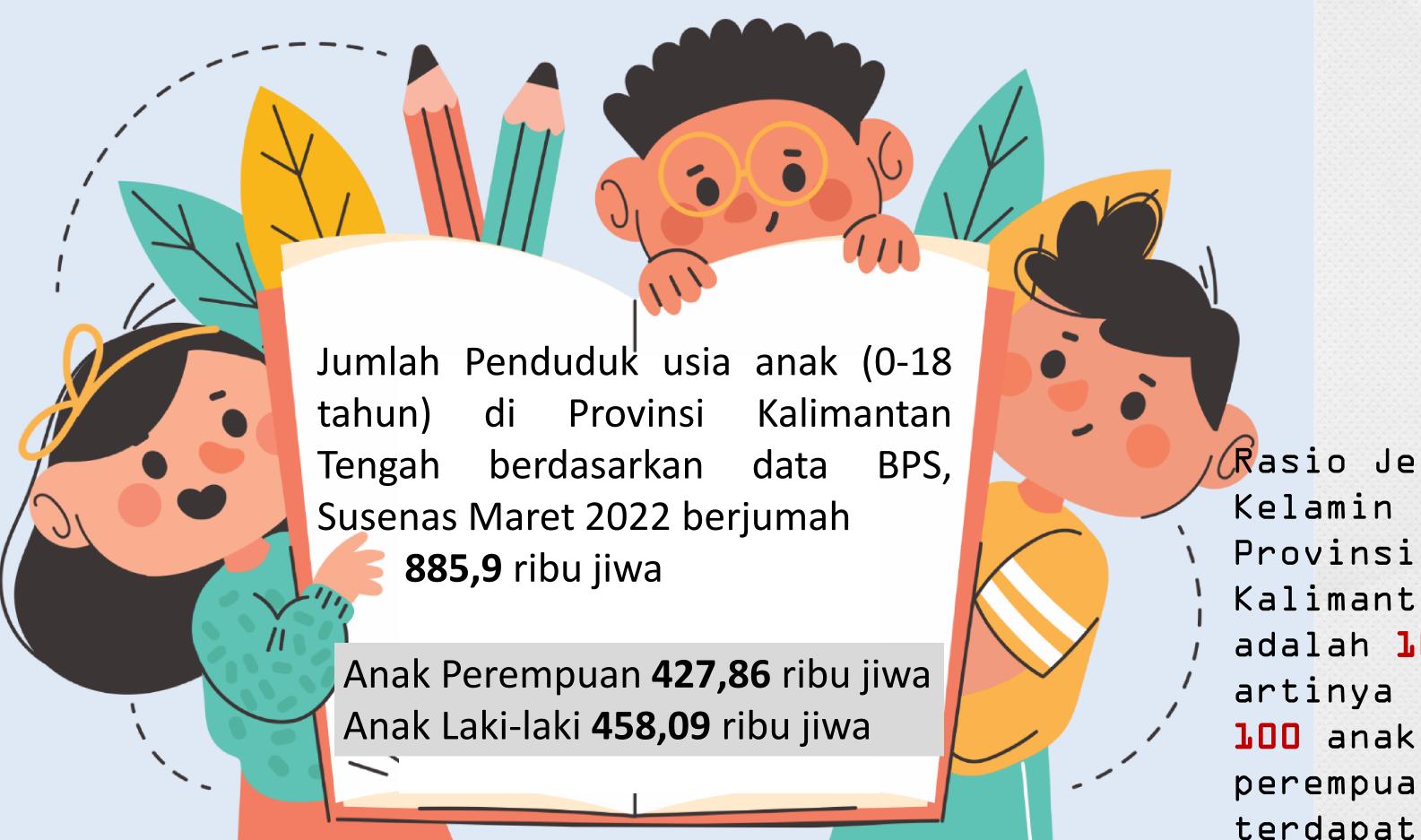
Jumlah penduduk

laki-laki 7,6 persen lebih 107,63 banyak dibandingkan perempuan The number of males is 7,6 percent higher than the number of females

Laki-Laki 1.420.902 jiwa

Perempuan 1.320.173 jiwa

Penduduk Usia Anak



Rasio Jenis
Kelamin anak di
Provinsi
Kalimantan Tengah
adalah 107.
artinya di antara
100 anak
perempuan

HASIL SENSUS PENDUDUK 2020

Berita Resmi Statistik No. 07/01/62/Th. XV, 21 Januari 2021

Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah Hasil SP2020

(September 2020)

2,67 Juta Jiwa

Jumlah ini bertambah 0,46 juta jiwa dibanding hasil SP2010

Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, 2010-2020



Meningkat dibandingkan periode 2000-2010 yang sebesar 1,79%

Penduduk Usia Produktif (15-64) Tahun

71,36%

Kalimantan Tengah masih dalam masa bonus demografi

Persentase Penduduk Lansia



6,52%

Naik dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 4,70%



Komposisi Penduduk Kalimantan Tengah

KONDISI KEPENDUDUKAN PROVINSI KALTENG



108

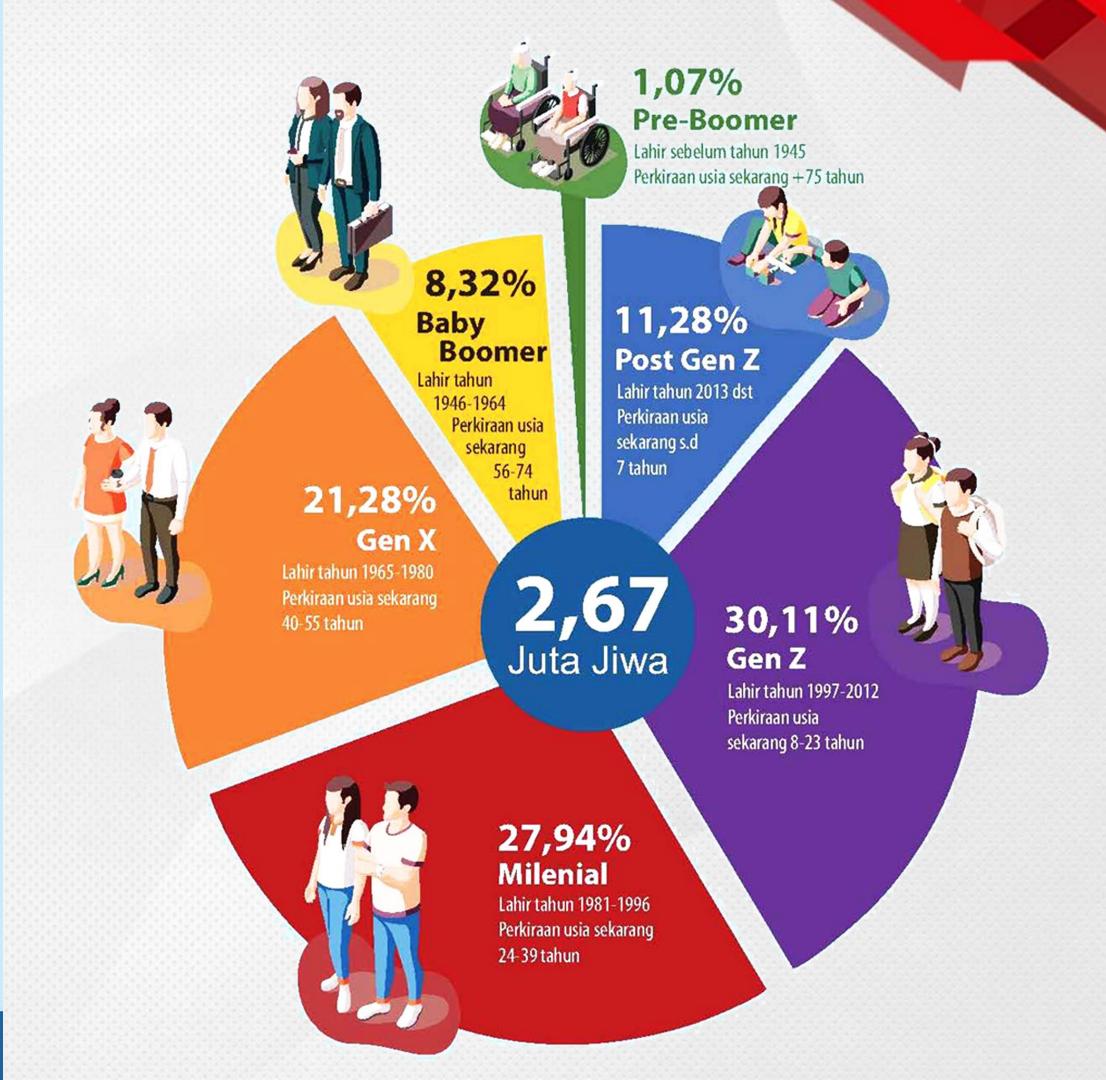
Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan



52,55%

Penduduk Kalimantan Tengah terkonsentrasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya





Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Apa Itu Indeks Pembangunan Manusia?

- IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

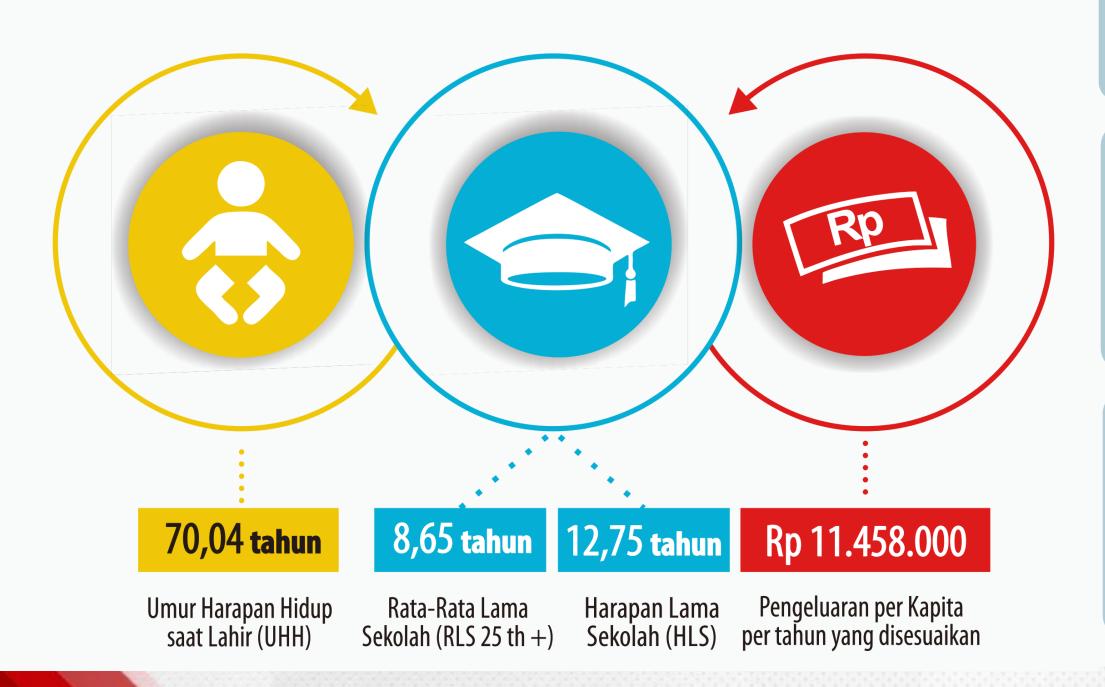
- Umur panjang dan hidup sehat (Dimensi Kesehatan)
- Pengetahuan (Dimensi Pendidikan)
- Standar hidup layak (Dimensi Pengeluaran/Ekonomi)

Menghitung IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran} \times 100}$$

KOMPONEN IPM KALIMANTAN TENGAH 2022





Bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga **70,04 tahun**, lebih lama 0,25 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya.



Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama **8,65 tahun**, dan anakanak di Kalimantan Tengah yang pada tahun 2022 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama **12,75 tahun**.



Pada tahun 2022, masyarakat Kalimantan Tengah memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar **11,46 juta rupiah** per tahun, meningkat 276 ribu rupiah dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi Tahun 2020-2022

Duovinoi	Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi				
Provinsi	2020	2021	2022		
ACEH	71.99	72.18	72.80		
SUMATERA UTARA	71.77	72	72.71		
SUMATERA BARAT	72.38	72.65	73.26		
RIAU	72.71	72.94	73.52		
JAMBI	71.29	71.63	72.14		
SUMATERA SELATAN	70.01	70.24	70.90		
BENGKULU	71.40	71.64	72.16		
LAMPUNG	69.69	69.90	70.45		
KEP. BANGKA BELITUNG	71.47	71.69	72.24		
KEP. RIAU	75.59	75.79	76.46		
DKI JAKARTA	80.77	81.11	81.65		
JAWA BARAT	72.09	72.45	73.12		
JAWA TENGAH	71.87	72.16	72.79		
DI YOGYAKARTA	79.97	80.22	80.64		
JAWA TIMUR	71.71	72.14	72.75		
BANTEN	72.45	72.72	73.32		
BALI	75.50	75.69	76.44		
NUSA TENGGARA BARAT	68.25	68.65	69.46		
NUSA TENGGARA TIMUR	65.19	65.28	65.90		
KALIMANTAN BARAT	67.66	67.90	68.63		
KALIMANTAN TENGAH	71.05	71.25	71.63		
KALIMANTAN SELATAN	70. 91	71.28	71.84		
MANTAN TIMUR	76.24	76.88	77.44		
KALIMANTAN UTARA	70.63	71.19	71.83		
SULAWESI UTARA	72.93	73.30	73.81		
SULAWESI TENGAH	69.55	69.79	70.28		
SULAWESI SELATAN	71.93	72.24	72.82		
SULAWESI TENGGARA	71.45	71.66	72.23		
GORONTALO	68.68	69	69.81		
SULAWESI BARAT	66.11	66.36	66.92		
MALUKU	69.49	69.71	70.22		
MALUKU UTARA	68.49	68.76	69.47		
PAPUA BARAT	65.09	65.26	65.89		
PAPUA	60.44	60.62	61.39		
INDONESIA	71.94	72.29	72.91		

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun

Drovinci	202	20	2021		2022	
Provinsi	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
ACEH	69.94	75.96	70.18	76.09	70.76	76.71
SUMATERA UTARA	68.83	75.91	69.08	76.14	69.90	76.76
SUMATERA BARAT	71.35	75.77	71.72	76.02	72.43	76.47
RIAU	68.09	77.25	68.46	77.46	69.10	77.89
JAMBI	67.08	75.87	67.46	76.12	68.09	76.55
SUMATERA SELATAN	68.15	73.77	68.34	74.00	69.24	74.49
BENGKULU	68.57	75.35	68.89	75.57	69.43	76.00
LAMPUNG	66.59	73.72	66.81	73.93	67.40	74.41
KEP. BANGKA BELITUNG	67.35	75.74	67.69	75.96	68.39	76.37
KEPULAUAN RIAU	73.97	79.27	74.25	79.42	74.89	80.10
DKI JAKARTA	79.17	83.66	79.54	83.87	80.08	84.36
JAWA BARAT	68.07	76.31	68.50	76.66	69.30	77.17
JAWA TENGAH	69.94	75.87	70.36	76.08	71.05	76.54
D I YOGYAKARTA	78.46	82.76	78.74	82.99	79.19	83.37
JAWA TIMUR	69.36	76.16	69.96	76.32	70.73	76.81
BANTEN	70.29	76.62	70.56	76.84	71.24	77.28
BALI	73.85	78.74	74.17	78.90	66.96	73.52
NUSA TENGGARA BARAT	65.75	72.69	66.15	73.07	64.98	69.90
NUSA TENGGARA TIMUR	64.13	69.16	64.22	69.33	64.14	73.21
KALIMANTAN BARAT	62.97	72.49	63.22	72.71	67.67	75.86
KALIMANTAN TENGAH	66.95	75.20	67.06	75.53	68.13	76.17
KALIMANTAN SELATAN	67.02	75.42	67.35	75.79	71.21	82.22
IMANTAN TIMUR	69.69	81.32	70.36	81.86	66.90	76.15
KALIMANTAN UTARA	65.36	75.41	66.20	75.83	73.11	77.05
SULAWESI UTARA	72.08	76.34	72.52	76.65	68.23	73.97
SULAWESI TENGAH	67.35	73.31	67.59	73.54	71.46	76.72
SULAWESI SELATAN	70.48	75.90	70.76	76.21	69.62	76.47
SULAWESI TENGGARA	68.66	75.87	68.98	76.07	63.70	72.29
GORONTALO	62.03	71.52	62.77	71.74	63.66	70.90
SULAWESI BARAT	62.79	70.21	63.06	70.40	68.65	73.66
MALUKU	67.88	73.01	68.17	73.15	67.14	74.35
MALUKU UTARA	65.99	73.69	66.31	73.88	61.26	73.27
PAPUA BARAT	60.35	72.79	60.52	72.92	53.93	66.55
PAPUA	52.52	65.99	52.96	66.07	70.31	76.73
INDONESIA	69.19	75.98	69.59	76.25	70.76	76.71

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020-2022

Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
KALIMANTAN TENGAH	71.05	71.25	71.63
Kotawaringin Barat	72.87	73.07	73.41
Kotawaringin Timur	71.31	71.38	71.67
Kapuas	69.48	69.63	70.01
Barito Selatan	70.22	70.54	71.01
Barito Utara	70.59	70.79	71.21
Sukamara	68.03	68.27	68.94
Lamandau	70.51	70.58	71.11
Seruyan	67.58	67.67	68.24
Katingan	68.68	68.89	69.74
Pulang Pisau	68.45	68.53	69.01
Gunung Mas	70.81	71.03	71.40
Barito Timur	71.39	71.47	72.07
Murung Raya	67.98	68.12	68.63
Kota Palangka Raya	80.77	80.82	81.16

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

Provinsi/Kabupaten/	202	20	202	21	2022	2
Kota	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
KALIMANTAN TENGAH	66.95	75.20	67.06	75.53	67.67	75.86
Kotawaringin Barat	70.76	77.19	70.96	77.39	77.69	71.39
Kotawaringin Timur	67.05	76.09	67.12	76.15	76.43	67.49
Kapuas	68.50	71.84	68.65	72.02	72.37	69.07
Barito Selatan	68.27	74.27	68.52	74.66	75.11	69.12
Barito Utara	65.78	75.38	66.06	75.51	75.82	66.65
Sukamara	65.60	72.08	66.08	72.23	72.84	66.92
Lamandau	68.01	73.97	68.07	74.06	74.54	68.65
Seruyan	64.26	71.91	64.35	72.17	72.80	64.92
Katingan	62.40	73.06	62.60	73.32	73.96	63.73
Pulang Pisau	66.23	71.94	66.30	72.03	72.44	66.81
Gunung Mas	68.42	74.30	68.56	74.53	74.84	68.99
Barito Timur	67.57	76.14	67.68	76.20	76.75	68.34
Murung Raya	61.55	73.66	61.67	73.81	74.26	62.22
Kota Palangka Raya	79.99	84.18	80.03	84.23	84.55	80.39
NDONESIA	64.13	69.16	69.59	76.25	70.31	76.73

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

IPG = Rasio IPM perempuan dengan laki-laki

Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki

IPG < 100, capaian perempuan < capaian laki-laki

IPG = 100, capaian perempuan sama dengan laki-laki

IPG > 100, capaian perempuan > capaian laki-laki

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Provinsi Tahun 2020-2022

Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
	92.07	92.23	92.24
ACEH SUMATERA UTARA	90.67	90.73	91.06
SUMATERA BARAT	94.17	94.34	94.72
RIAU	88.14	88.38	88.71
JAMBI	88.41	88.62	88.95
SUMATERA SELATAN	92.38	92.35	92.95
BENGKULU	91.00	91.16	91.36
LAMPUNG	90.33	90.37	90.58
KEP. BANGKA BELITUNG	88.92	89.11	89.55
KEPULAUAN RIAU	93.31	93.49	93.50
DKI JAKARTA	94.63	94.84	94.93
JAWA BARAT	89.20	89.36	89.80
JAWA TENGAH	92.18	92.48	92.83
D I YOGYAKARTA	94.80	94.88	94.99
JAWA TIMUR	91.07	91.67	92.08
BANTEN	91.74	91.83	92.18
BALI	93.79	94.01	94.36
NUSA TENGGARA BARAT	90.45	90.53	91.08
NUSA TENGGARA TIMUR	92.73	92.63	92.96
KALIMANTAN BARAT	86.87	86.95	87.61
KALIMANTAN TENGAH	89.03	88.79	89.20
KALIMANTAN SELATAN	88.86	88.86	89.44
ALIMANTAN TIMUR	85.70	85.95	86.61
KALIMANTAN UTARA	86.67	87.30	87.85
SULAWESI UTARA	94.42	94.61	94.89
SULAWESI TENGAH	91.87	91.91	92.24
SULAWESI SELATAN	92.86	92.85	93.14
SULAWESI TENGGARA	90.50	90.68	91.04
GORONTALO	86.73	87.50	88.12
SULAWESI BARAT	89.43	89.57	89.79
MALUKU	92.97	93.19	93.20
MALUKU UTARA	89.55	89.75	90.30
PAPUA BARAT	82.91	83.00	83.61
PAPUA	79.59	80.16	81.04
INDONESIA	91.06	91.27	91.63

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2022

Provinsi/Kabupaten/Kota	2020	2021	2022
KALIMANTAN TENGAH	89.03	88.79	89.20
Kotawaringin Barat	91.67	91.69	91.89
Kotawaringin Timur	88.12	88.14	88.30
Kapuas	95.35	95.32	95.44
Barito Selatan	91.92	91.78	92.03
Barito Utara	87.26	87.49	87.91
Sukamara	91.01	91.49	91.87
Lamandau	91.94	91.91	92.10
Seruyan	89.36	89.16	89.18
Katingan	85.41	85.38	86.17
Pulang Pisau	92.06	92.04	92.23
Gunung Mas	92.09	91.99	92.18
Barito Timur	88.74	88.82	89.04
Murung Raya	83.56	83.55	83.79
Kota Palangka Raya	95.02	95.01	95.08
INDONESIA	91.06	91.27	91.63

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

- IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.
- IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.
- Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.

Dimensi	Indikator	
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki &	
Reter waknan di Panemen	Perempuan	IDC
Dongambilan konutusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja	IDG
Pengambilan keputusan	profesional dan Teknisi; Laki-laki & Perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian; Laki-2 & Perempuan	

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Provinsi Tahun 2020-2022

Provinsi / Kabupaten / Kota	2019	2021	2022
ACEH	63.47	63.24	63.92
SUMATERA UTARA	67.52	67.79	69.33
SUMATERA BARAT	58.28	65.12	65.48
RIAU	68.70	70.59	71.16
JAMBI	65.86	65.93	67.86
SUMATERA SELATAN	74.64	73.88	74.89
BENGKULU	70.48	70.22	70.13
LAMPUNG	69.06	67.96	68.24
KEP. BANGKA BELITUNG	53.03	57.49	58.20
KEP. RIAU	62.02	58.97	59.05
DKI JAKARTA	75.16	75.42	75.30
JAWA BARAT	70.24	70.62	71.22
JAWA TENGAH	71.73	71.64	73.78
DI YOGYAKARTA	74.73	76.57	76.87
JAWA TIMUR	73.03	72.36	74.42
BANTEN	68.76	69.09	68.55
BALI	72.16	72.17	72.29
NUSA TENGGARA BARAT	51.96	52.54	53.47
NUSA TENGGARA TIMUR	74.53	74.53	75.22
KALIMANTAN BARAT	68.07	71.14	73.18
KALIMANTAN TENGAH	82.41	82.08	81.98
_ KALIMANTAN SELATAN	74.48	74.58	74.80
KALIMANTAN TIMUR	65.54	66.64	66.89
KALIMANTAN UTARA	64.31	61.70	61.92
SULAWESI UTARA	78.98	79.07	78.99
SULAWESI TENGAH	75.78	75.80	77.52
SULAWESI SELATAN	76.32	74.76	76.37
SULAWESI TENGGARA	72.54	73.10	73.72
GORONTALO	70.74	70.40	71.20
SULAWESI BARAT	65.92	65.93	66.55
MALUKU	75.54	75.54	74.99
MALUKU UTARA	77.28	78.59	78.99
PAPUA BARAT	62.17	62.17	61.93
PAPUA	66.72	67.50	68.66
INDONESIA	75.57	76.26	76.59

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah 2020-2022

Provinsi / Kabupaten / Kota	2020	2021	2022
KALIMANTAN TENGAH	82.41	82.08	81.98
KOTAWARINGIN BARAT	64.53	63.44	63.00
KOTAWARINGIN TIMUR	69.52	69.51	67.38
KAPUAS	73.33	73.02	73.35
BARITO SELATAN	86.05	86.17	86.34
BARITO UTARA	85.02	85.62	87.10
SUKAMARA	66.02	66.40	67.33
LAMANDAU	71.26	70.26	69.98
SERUYAN	63.20	63.19	62.16
KATINGAN	66.36	67.66	66.80
PULANG PISAU	70.63	70.35	69.68
GUNUNG MAS	88.22	88.71	89.15
BARITO TIMUR	81.98	82.44	82.56
MURUNG RAYA	68.21	67.72	67.48
KOTA PALANGKA RAYA	79.12	78.72	80.48
ONESIA	75.57	76.26	76.59

Lima Dimensi Hak Anak



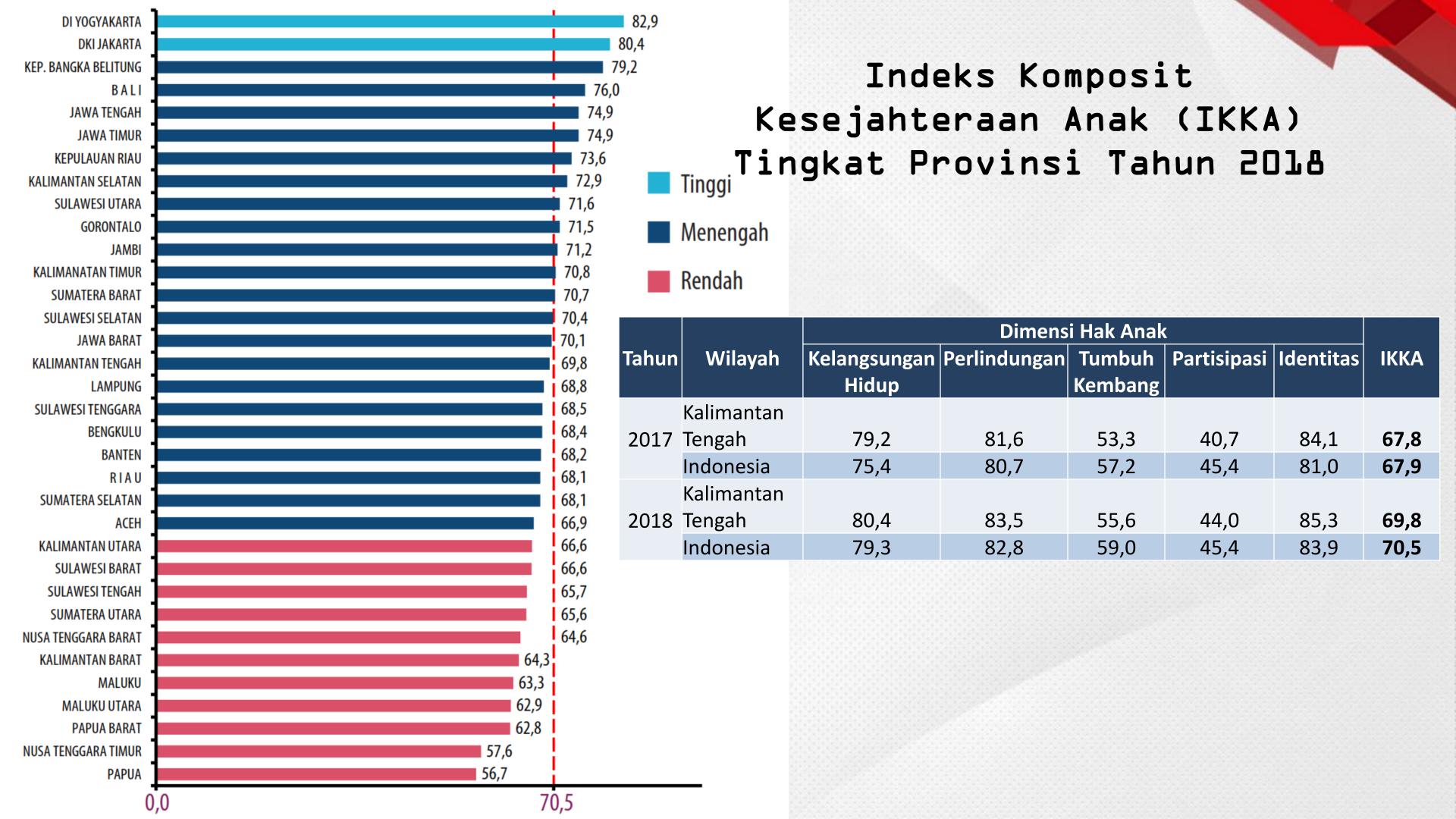
Indeks Komposit Kesejahteraan Anak

Indeks Komposit Kese atteran Anak (IKKA) adalah suatu angka yang merepresentasikan tingkat kesejahteraan anak/pemenuhan hak-hak anak yang sudah mencakup 11 indikator dari 5 dimensi kebutuhan anak.

Indikator Pembentukan IKKA Tingkat Kabupaten

dan Kota

Dimensi	Jenjang Kehidupan Anak			
Difficusi	Balita (0-4 tahun)	Anak umur 5-17 tahun		
Kelangsungan Hidup	1. AKBa	2. Angka morbiditas		
Perlindungan	3. Prevalensi imunisasi dasar dan lengkap	4. Prevalensi pernah kawin5. Prevalensi pekerja anak		
Tumbuh Kembang	6. APS PAUD	7. APS 5-17 Tahun		
Partisipasi	8. % Berwisata	9. % Berwisata		
Identitas	10. % memiliki akta kelahiran	11. % memiliki akta kelahiran		



Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017

	Dimensi Hak Anak					
Kabupaten/Kota	Kelangsungan Hidup	Perlindunga n	Tumbuh Kembang	Partisipasi	Identita s	IKKA
(1)	(2)	(E)	(4)	(5)	(日)	(7)
Kotawaringin Barat	82 ₇ 25	87,26	47,33	44,02	91,03	70,38
Kotawaringin Timur	76,99	81,68	48,38	20,27	71,74	59,81
Kapuas	77,15	67,72	50,44	55,56	55,97	54,71
Barito Selatan	85-70	74,71	63,43	31,44	88,66	68,07
Barito Utara	79-10	74,00	53,76	35,58	88,95	65,62
Sukamara	77-87	84,26	65,60	47,66	89,74	72,43
Lamandau	79,63	81,02	P3 - 50	53,43	90,89	73,64
Seruyan	84,65	82,49	51,97	45,97	88,09	70,63
Katingan	76,25	84764	55,22	48,35	83,05	69,50
Pulang Pisau	72,31	78,07	51,25	42,76	83,42	65,56
Gunung Mas	81 ⁻ 50	80,95	51,22	41,48	83,27	67,62
Barito Timur	79,32	86,39	55,35	38-15	85-11	P8 - 5P
Murung Raya	79,35	78 ₇ 97	55,66	18,33	64,25	59,31
Kota Palangka Raya	76,47	82,34	51,90	58,97	89,89	71,91
KALIMANTAN TENGAH	79,23	81,60	53,29	40,68	84,13	67,79

Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

	Dimensi Hak Anak					
Kabupaten/Kota	Kelangsungan Hidup	Perlindunga n	Tumbuh Kembang	Partisipasi	Identita s	IKKA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(L)	(7)
Kotawaringin Barat	83,65	89,63	49	47,07	91,49	72,17
Kotawaringin Timur	79,11	83,08	50 - 14	22,03	74 ₇ 8	61,83
Kapuas	79,83	70,28	52,07	24,18	59,01	57,08
Barito Selatan	83,69	76,3	647	34,17	89,51	69,67
Barito Utara	81-11	75,99	55,01	35,08	90 , 9	67,62
Sukamara	78 ₇ 26	86,28	63,56	51,21	91,12	74,09
Lamandau	80,83	82,76	64,67	56 ₇ 3	91,69	75,25
Seruyan	86,39	84,35	53,43	49-19	89,25	72,52
Katingan	78 ₇ 55	86,94	56 - 5	51,55	85-14	71,73
Pulang Pisau	75,02	79,66	52,43	46,3	85,74	67,83
Gunung Mas	82 - 1	82,81	52,91	44,74	85,24	69,56
Barito Timur	80,94	88-11	56,86	41-11	83,71	70,15
Murung Raya	79 - 55	81,65	57	20,97	67,49	61,33
Kota Palangka Raya	78 ₇ 69	85,01	53,57	62,53	91,2	74,2
KALIMANTAN TENGAH	80,45	83,48	55,61	44-01	85,27	69,76

Perkawinan dan fertilitas anak

PERKAWINAN ANAK

Persentase anak usia 10-18 tahun di Provinsi Kalimantan Tengah yang kawin ada sebanyak 1,35 persen.

2 ANAK LAHIR HIDUP

Persentase anak perempuan usia 10-18 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup ada sebanyak 1,28 persen.

KELUARGA | BERENCANA 3

Ada sebanyak 60,46 persen anak perempuan usia 10-18 tahun yang berstatus kawin/ pernah kawin dan sama sekali tidak pernah menggunakan alat/cara KB.

ALAT/CARA KB

4

Sekitar 94,02 persen anak perempuan usia 10-18 tahun yang berstatus kawin/pernah kawin dan sedang ber-KB, menggunakan suntikan KB sebagai alat/cara KB.

SISTEM INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

APLIKASI SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK (SIGA)

http://dp3appkb.kalteng.go.id/siga

Portal data yang bertujuan meningkatkan dan melengkapi penyajian dan pengumpulan data gender dan anak yang dilakukan sektor dan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)

APLIKASI SISTEM INFORMASI ONLINE PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SIMFONI PPA)

https://kekerasan.kemenpppa.go.id

Merupakan rujukan terkait pencatatan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online yang dibangun oleh kementerian PPPA

SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK (SIGA)

Aplikasi sistem informasi untuk pengumpulan data dari berbagai sektor dan memberikan informasi memberikan informasi data pilah gender dan danak, secara up to date dan akurat

APLIKASI S I G A

OPD PROVINSI

Diisi oleh SKPD Provinsi sesuai data yang dimiliki OPD KAB/KOTA

Diisi oleh SKPD kab/kota PENGENDALIAN KAB/KOTA

Diisi oleh Dinas PP kab/kota data2 dinamis

KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK (SIGA)

- Mendorong SKPD/Lembaga dalam penyediaan data pilah gender dan anak
- Membuat dokumen profil, analisis, statistik dll melalui proses pengolahan data terpilah untuk menentukan isu gender.
- Memanfaatkan aplikasi SIGA dalam pendokumentasian dan penyajian datanya
- Penyusunan dokumen (analisis, profil, statistik dll)

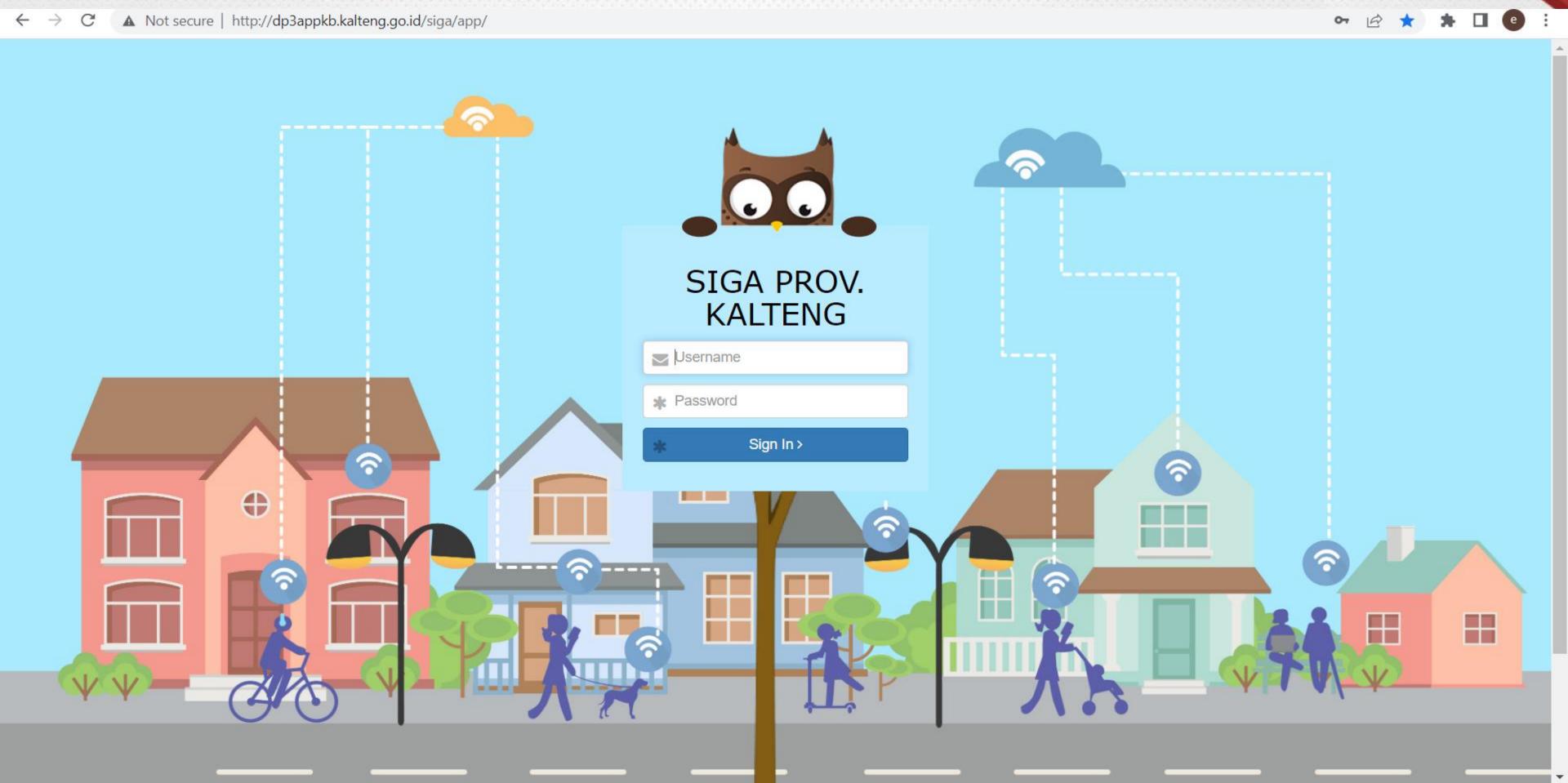
KEBIJAKAN DATA SIMFONI PPA

- Mekanisme penanganan kasus menggunakan aplikasi SIMFONI
- Mengintegrasikan semua layanan UPT/ULT/P2TP2A/unit layanan kasus kekerasan terhadap peremuan dan anak dalam pendokumentasian.
- Menyusun dokumen analisis data kekerasan sebagai bahan pelaporan.

SIGA KALTENG http://dp3appkb.kalteng.go.id/siga



dp3appkb.kalteng.go.id/siga/app/



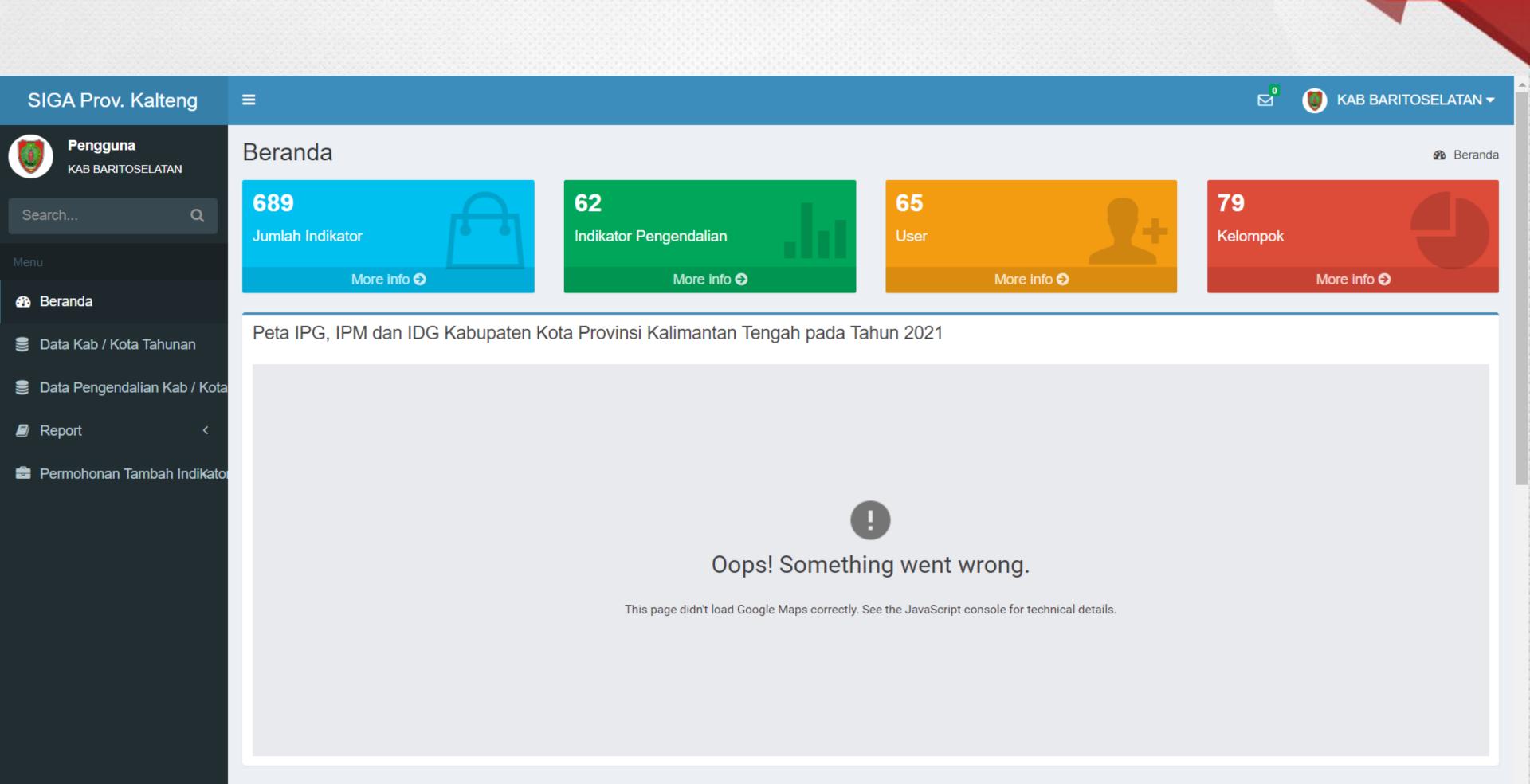


Diagram Data KHPP

7

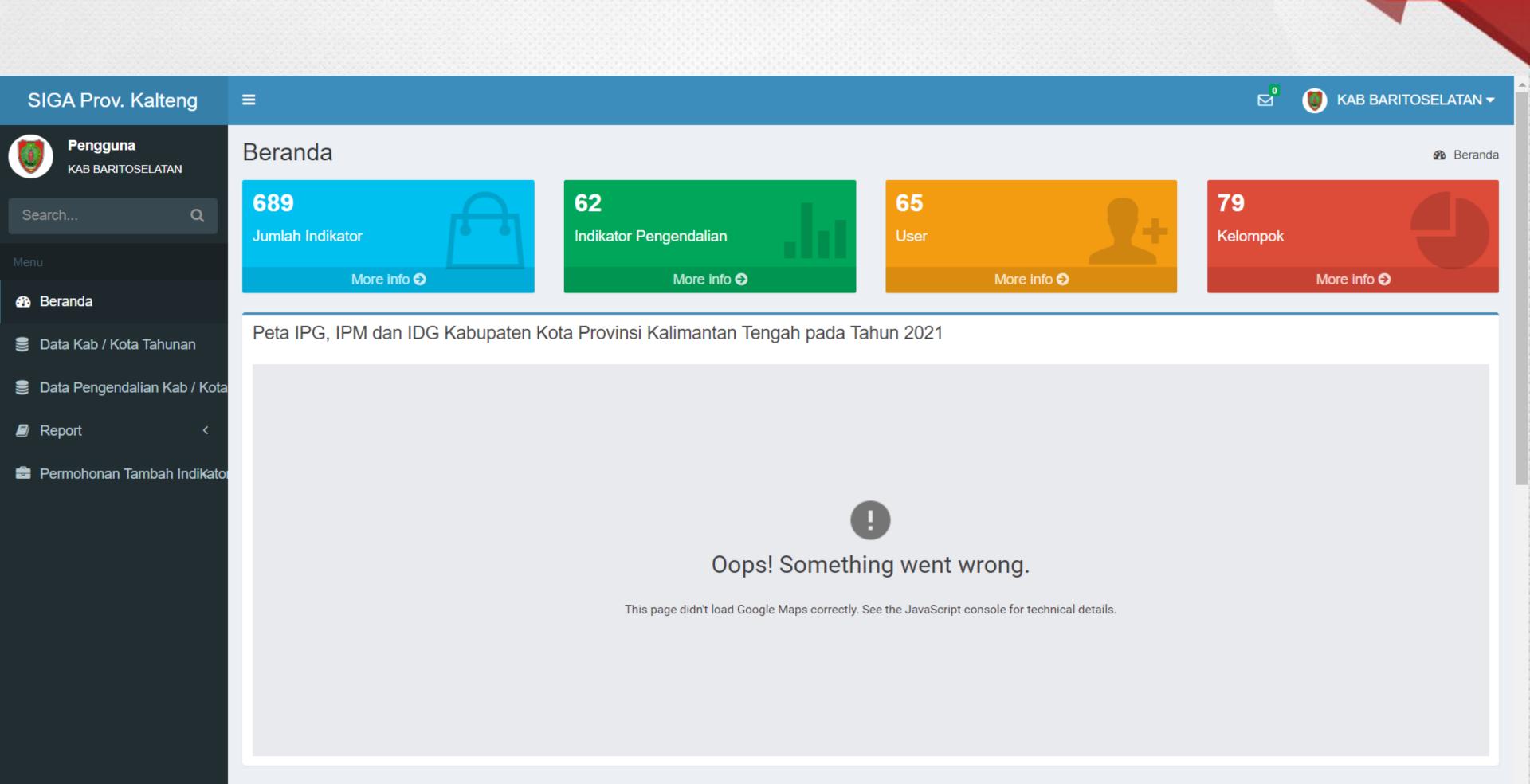
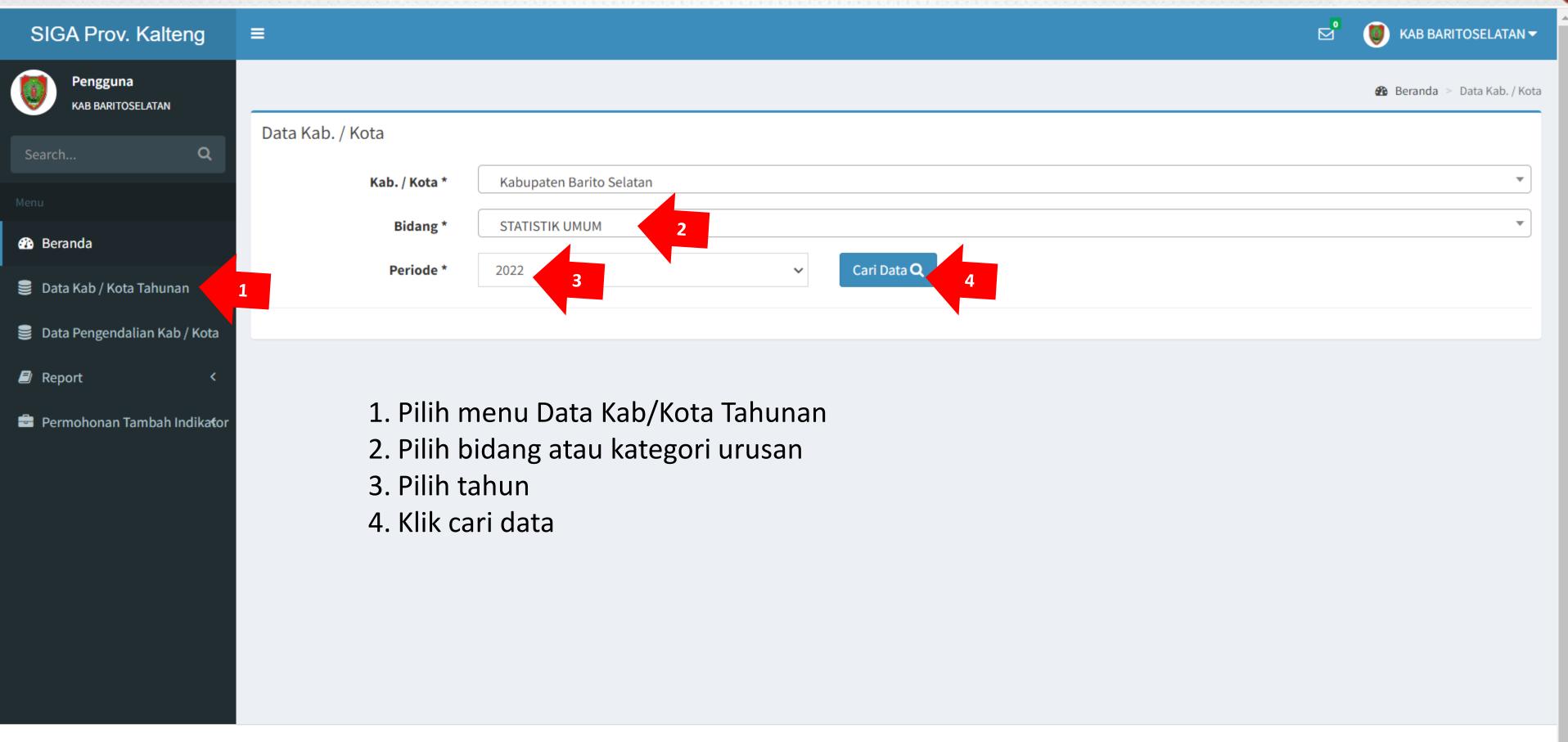


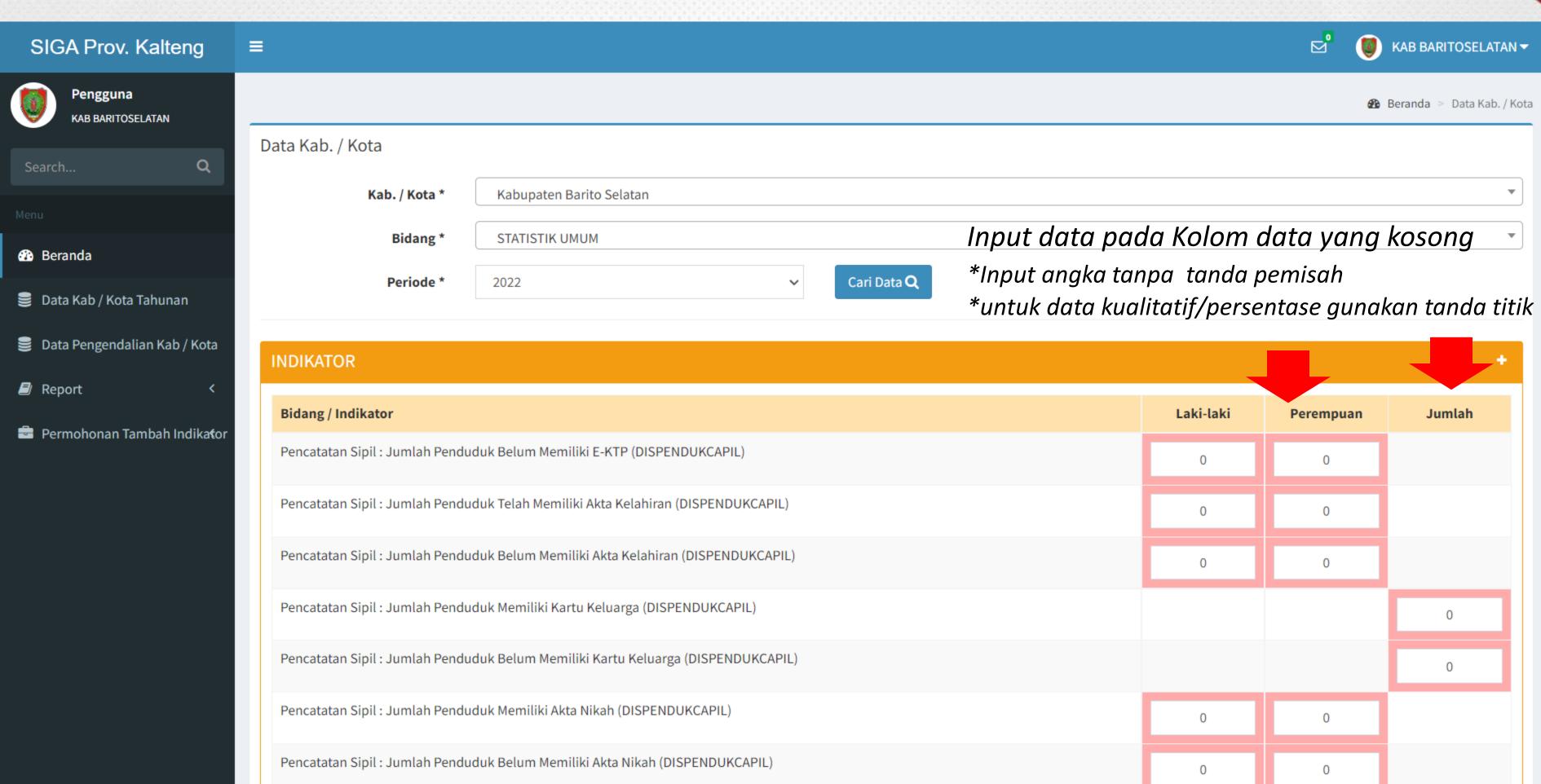
Diagram Data KHPP

7

Memulai Input Data



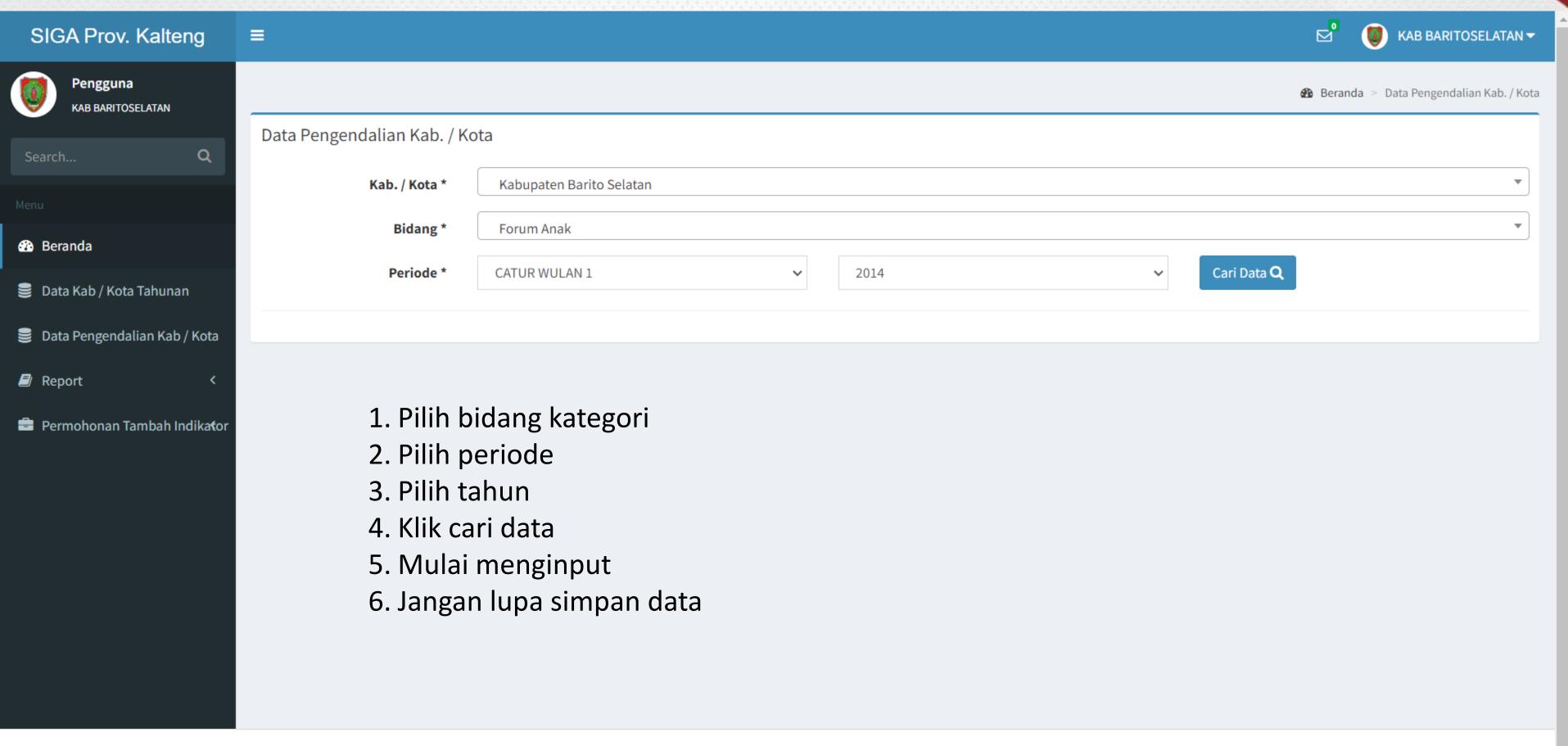
Memulai Input Data



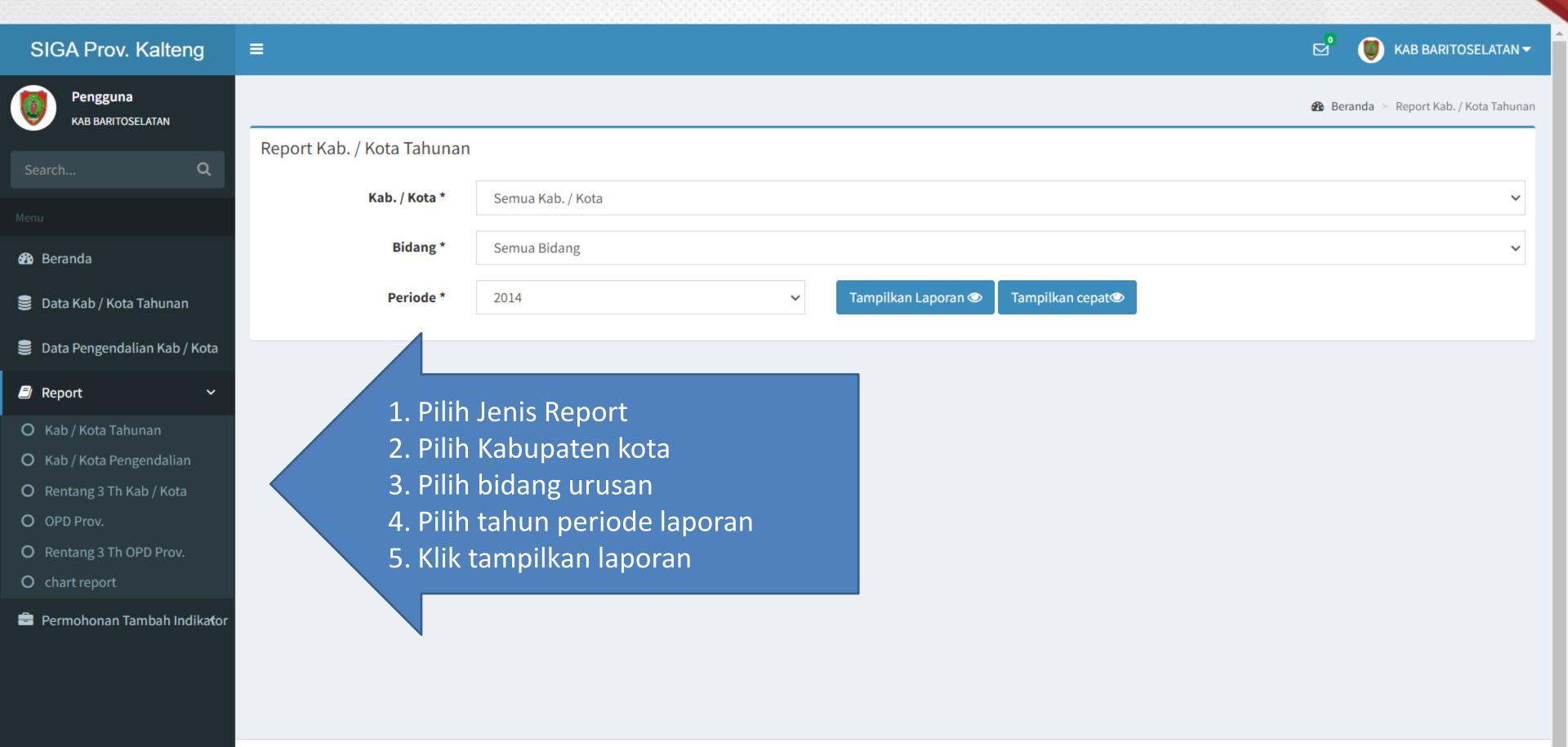
Memulai Input Data



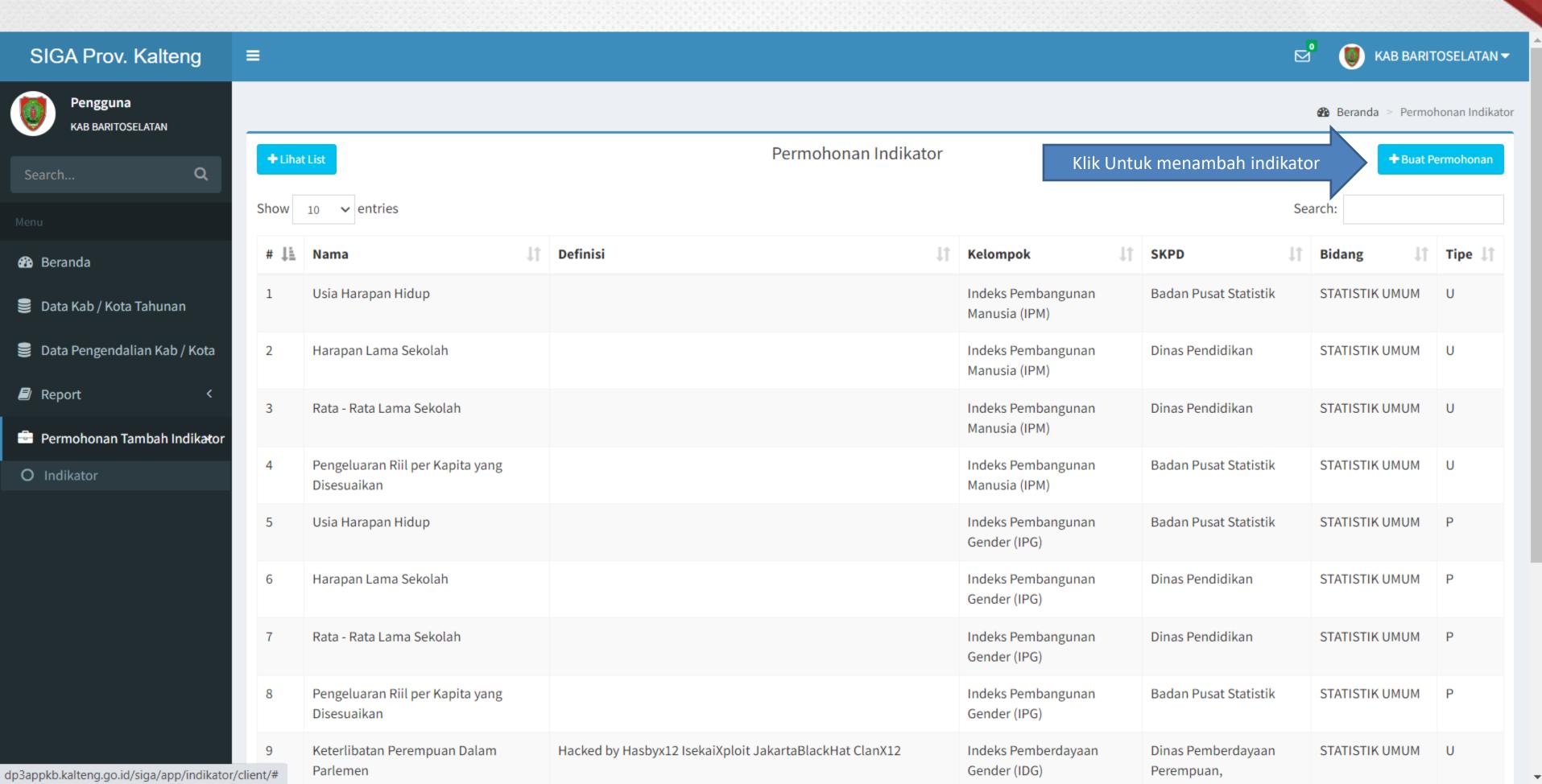
Form data Pengendalian



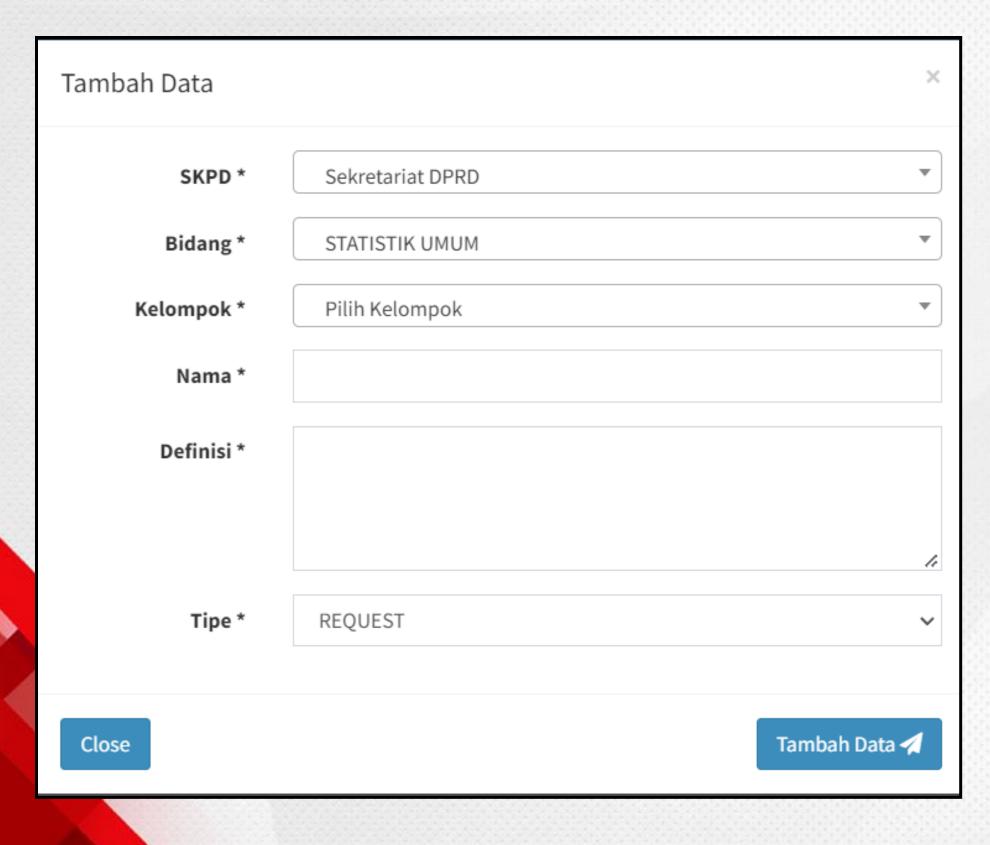
Form Report



Form Permohonan tambah indikator



Form Permohonan tambah indikator



- 1. Pilih SKPD (disesuaikan dengan bidang urusan kebutuhan indikator organisasi)
- 2. Pilih Bidang
- 3. Pilih kelompok
- 4. Pada kolom "Nama" isikan nama indikator
- 5. kolom "Definisi" diisi dengan penjelasan singkat terkait indikator
- 6. Selanjutnya klik "tambah data"

SIMFONI PPA https://kekerasan.kemenpppa.go.id









https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login











Selamat Datang,

SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, telah menyusun berbagai regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebagai tindaklanjutnya, telah direspon oleh berbagai pihak hampir di seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota, melalui peraturan daerah, peraturan gubernur, dan perbup/perwali dengan membentuk unit layanan penanganan kekerasan dengan beragam nama, seperti Women Crissis Center (WCC), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang didalamnya terdiri dari unsur SKPD terkait, rumah sakit atau layanan medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Organisasi Keagamaan.

Seiring dengan terbentuknya lembaga layanan terpadu tersebut, diperlukan sistem pendokumentasian data kekerasan, melalui sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan lintas kabupaten maupun lintas provinsi, melalui sistem aplikasi yang terpadu dan komprehensif.

Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telah mengembangkan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), yang dapat di akses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota secara up to date, riil time dan akurat, untuk menuju SATU DATA, DATA KEKERASAN NASIONAL.

Sistem ini dibangun sebagai media pendataan, monitoring dan evaluasi kasus kekerasan perempuan dan anak di Indonesia

Stop Kekerasan Perempuan dan Anak sekarang juga!

Lihat Ringkasan Data

SIMFONI PPA

username

password

19 + 6 =

ketik jawaban disini

Sign In

MEMBANGUN DATA MEMANG MAHAL DAN SULIT TETAPI MEMBANGUN TANPA DATA JAUH LEBIH MAHAL DAN SULIT

TERIMA KASIH



dp3appkb.kalteng.go.id uptppa.kalteng.go.id



dinas pemberdayaan perempuan kalteng



pemberdayaanperempuankalteng uptppaprovinsikalteng



dp3appkb@kalteng.go.id bp3akkb@gmail.com uptppaprovkalteng@gmail.com